

PERUBAHAN STRUKTUR PELUANG POLITIK DAN STRATEGI ADAPTASI GERAKAN PETANI

Hartoyo¹

Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
E-mail: htyiluh@yahoo.co.id

ABSTRAK

Gerakan petani di Lampung sangat penting dilihat sebagai gerakan "by design". Isu strategisnya adalah "reforma agraria", dan mampu diimplementasikan kedalam gerakan-gerakan petani lokal. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dinamika gerakan petani di Lampung tahun 1998-2015, menggunakan gabungan teori-teori gerakan sosial. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasilnya, pertama, "sub kultur oposisi petani" menjadi faktor utama munculnya gerakan petani. Kedua, berkembangnya gerakan petani ditentukan oleh derajat ketegangan struktural, terbukanya peluang politik, dan dukungan jejaring eksternal. Ketiga, puncak gerakan terjadi selama tahun 1998-2004, kemudian terus menurun. Sebabnya adalah terjadi perebutan kepentingan di antara elit aktor, semakin ketatnya struktur peluang politik, dan semakin lemahnya sumberdaya gerakan, manajemen organisasi dan kaderisasi. Keempat, semakin lemahnya jejaring eksternal dan produksi isu strategis, serta kondisi gerakan yang stagnan. Kelima, gerakan contercultural berubah menjadi subkultural, lokalistik dan cenderung masuk pada jalur involusi. Keenam, strategi gerakan berubah semakin adaptif terhadap lingkungan sosiopolitik dan sosiokultural dominan, sehingga tujuan gerakan petani menjadi tidakterfokus pada tujuan semula.

Kata kunci: gerakan petani, reformaagraria, stagnasi, involusi, adaptasi.

CHANGES IN POLITICAL OPPORTUNITY STRUCTURES AND ADAPTATION STRATEGY IN PEASANT MOVEMENT

Hartoyo

Department of Sociology, Faculty of Social and Political Sciences, University of Lampung
E-mail: htyiluh@yahoo.co.id

ABSTRACT

Peasant movement in Lampung needs to be seen prominently as a movement "by design". The strategic issue is "agrarian reform" which is able to be implemented into the movements of local peasants. This study aims to explain the dynamics of peasant movement in Lampung in 1998-2015, using a combination of social movement theories. Data were collected through interviews, observation, and documentation. As a result, first, "sub-culture of peasant opposition" is a major factor in the rise of the movement. Second, the development of the movement is determined by the degree of structural tensions, the opening of political opportunity, and the support from external networking. Third, the movement peaked during 1998-2004, and continued to decline. The main reason behind this inclination was conflict of interests among elite actors, and increased political opportunity structure, and the weakness of the resources movement, organizational management and regeneration. Fourth, the weakening of external networks and the production of strategic issues, as well as the movement's stagnant

¹ Penulis adalah staf pengajar di Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Lampung. Pendidikan S-3 dari Program Studi Sosiologi Pedesaan, Departemen Ekologi Manusia, IPB. Fokus kajiannya manajemen konflik, gerakan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Karya terbaru berjudul "Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru".

condition. Fifth, countercultural movement turned into a subcultural, locality and tend to go on the path of involution. Sixth, the movement strategies became more adaptive to changing socio-political environment and sociocultural dominant, so the goal of the movement became unfocused on its original purpose.

Keywords: *peasant movements, agrarian reform, stagnation, involution, adaptation.*

1. PENDAHULUAN

Dekonstruksi struktur politik di Indonesia yang memuncak pada akhir tahun 1990-an berdampak pada terbukanya struktur peluang politik dan berkembangnya gerakan-gerakan petani pada aras lokal. Pada situasi ini terjadi akselerasi dan penetrasi isu-isu reforma agraria transnasional yang diterjemahkan dalam program-program aksi pada level nasional dan lokal melalui instrumen organisasi tani. Fenomena ini tidak cukup difahami melalui pendekatan konvensional sebagai tindakan kolektif “*by product*” akibat kebijakan pembangunan (Sunarto, 2007). Analisis perkembangan gerakan petani juga kurang memadai jika mengandalkan teori-teori gerakan sosial klasik, neoklasik, dan gerakan sosial baru. Gerakan petani di Indonesia lebih tepat difahami sebagai gerakan sosiopolitik, sosiokultural, dan “*by design*” sebagai wujud berkembangnya kesadaran baru masyarakat sipil. Sumberdaya dimobilisir untuk melakukan aksi-aksinya mengusung agenda reforma agraria dalam memanfaatkan terbukanya struktur peluang politik (Hartoyo, 2010).

Studi-studi sebelumnya menemukan bahwa gerakan-gerakan petani di Indonesia gagal meningkatkan posisi tawarnya dalam menguasai kembali tanah pertanian (Ngadisah, 2003; Wahyudi, 2005; Mustain, 2007; dan Silaen, 2007). Indikasinya adalah kondisi gerakan mengalami koma, orientasinya menjadi terpecah (*diffuse*) tidak fokus pada persoalan agraria lagi. Menurut Paradakis (1988), persoalan utamanya terletak pada perilaku aktor terkait dengan institusionalisasi karakter dan lemahnya komitmen terhadap organisasi gerakan. Pertimbangan rasional-ekonomi para elit aktor gerakan berpengaruh terhadap disintegrasi dan dalam melakukan transformasi yang sejalan dengan agenda reforma agraria. Faktor lain, menurut Törnquist (2007), adalah manajemen diri, pengorganisasian, metode mengorganisir, fokus pada isu, dan dalam membaca peluang politik. Lemahnya kondisi internal gerakan saling berhubungan dengan semakin kuatnya tekanan-tekanan eksternal, sehingga posisi petani dan perjuangannya menjadi sebatas memperbertahankan diri (Wahab, 2012). Berkembangnya fenomena tersebut diduga berkaitan dengan penguatan struktur peluang politik yang semakin mempersempit ruang untuk melakukan gerakan sosiopolitik *countercultural*. Situasi politik yang demikian berkonsekuensi pada pentingnya merubah strategi adaptasi gerakan petani.

Penelitian ini bertujuan menjelaskan sebab utama terjadinya konflik pertanahan dan dinamika gerakan petani sejalan dengan semakin menguatnya struktur peluang politik negara, serta perubahan strategi adaptasi gerakan petani dalam mengusung agenda reforma agraria. Gerakan tersebut direpresentasikan oleh organisasi-organisasi gerakan petani pada level provinsi yang membina organisasi-organisasi petani lokal sebagai basis sumberdaya gerakan.

2. GERAKAN PETANI DALAM SINTESIS TEORI-TEORI GERAKAN SOSIAL

Berdasarkan perkembangan perspektif teori-teori gerakan sosial, terdapat beberapa ahli yang sudah tidak lagi terfokus pada satu perspektif teori dalam menjelaskan fenomena gerakan sosial. Analisis mereka tidak lagi hanya berada ruang makro-struktural, tetapi lebih luas dan mendalam dengan memperhatikan pentingnya ruang-ruang mikro-prosesual (perspektif teori psikososial). Kedua perspektif teori tersebut merupakan elemen yang saling terkait untuk menganalisis gerakan sosial (Mc Adam dan

David Snow, 1997; McAdam dan Scott, 2002). Terdapat keterkaitan timbal-balik antara struktur mobilisasi, peluang politik dan proses framing sebagai kesatuan dalam gerakan sosial sebagaimana dikemukakan (McAdam, Tarrow dan Tilly, 2001). Ini menunjukkan bahwa dimensi struktur dan tindakan aktor (proses) tidak dapat dipisahkan dalam praktek gerakan sosial. Jarak antara dimensi struktur dan tindakan aktor terdapat jaringan-jaringan sosial internal dan eksternal, baik dalam kerangka konsensus untuk memperkuat organisasi gerakan sosial, maupun dalam kerangka konflikual yang menyebabkan terjadi fragmentasi antar kelompok dan antar individu aktor dalam siklus organisasi gerakan sosial.

Gerakan-gerakan sosial bersifat dinamis, membentuk struktur jaringan internal dan eksternal, mencari dan merespon peluang-peluang politik (*political opportunity*) yang dianggap mendukung atau menghambatnya, dan di dalamnya terjadi proses framing (*framing process*) antar aktor untuk dapat melakukan perubahan sosial. Eksistensi organisasi gerakan bukan hanya ditentukan oleh faktor struktural dan kultural, tetapi juga oleh berbagai kepentingan para aktor. Dalam perspektif rasionalitas, konsep “aktor” menurut Mancur Olson menunjuk pada kelompok individu yang melakukan tindakan atas nama kepentingan bersama mereka, sama halnya dengan para individu yang dapat diharapkan melakukan tindakan atas nama kepentingan mereka (Morris and Mueller, Editor, 1992: 6)

Disini terdapat dua kekuatan utama organisasi gerakan, yaitu eksistensi para aktor dan bangunan jaringan. Bangunan jaringan internal organisasi mencakup kepemimpinan, struktur, nilai, norma, visi, misi, strategi, garis ideologi, rekrutmen, kekuatan basis konstituen, kekuasaan, taktik, aksi, hingga pada tujuan gerakan. Sedangkan bangunan jaringan eksternal terkait dengan faktor mobilisasi dan memelihara atau mempertahankan keberlangsungan kekuatan hubungan eksternal dalam melakukan perubahan tatanan sosial yang lebih baik.

Kekuatan dan keberlangsungan mobilisasi sumberdaya (*resource mobilization*) terkait dengan sejauh mana kolektivitas aktor mampu mencari, menciptakan, dan memanfaatkan secara inovatif struktur peluang-peluang politik yang ada dan mengatasi hambatan-hambatan gerakan dalam proses politik dan pemberdayaan para anggotanya. Struktur mobilisasi sumberdaya dan peluang politik terkait dengan proses dan hasil konstruksi ide, instrumen, dan tujuan yang dilakukan oleh kolektivitas aktor gerakan secara berulang, melalui proses-proses produksi dan reproduksi pengetahuan, ideologi, jaringan, strategi, taktik hingga dalam melakukan aksi-aksi gerakan untuk mencapai tujuan. Disini dinamika organisasi gerakan juga tidak terlepas dari sistem sosiokultural, karena eksistensinya berada dan melekat di dalam masyarakat di mana mereka berada.

Pada perkembangan awal perspektif teori mobilisasi sumberdaya dan peluang politik selain lebih condong pada teori politik juga lebih menekankan pada prinsip rasionalitas dan kepentingan individu aktor (*self-interest*) daripada aspek psikososial seperti keluhan-keluhan, solidaritas, dan ideologi. Beberapa kritik telah diterima karena mendudukkan aktivitas aktor terlalu rasional, terlalu tidak emosional, dan terlalu berorientasi politik. Tidak semua tindakan kolektif direncanakan dengan matang, dan tidak semua episode tindakan kolektif secara eksplisit berorientasi politik seperti yang diasumsikan (Barkan and Snowden, 2001: 25). Kritik tersebut kemudian mendorong perspektif teori ini menerima konsepsi-konsepsi psikososial yang sebelumnya kurang diperhatikan. Ini didasarkan pada realitas bahwa perspektif teori ini selalu menghadapi tiga problem utama dalam analisis gerakan sosial, yakni problem identitas kolektif, problem kesadaran, dan problem solidaritas. Problem identitas kolektif ketika tidak mampu menjawab mengapa dan kapan karakteristik yang sama menjadi relevan bagi pengakuan timbal balik para anggota kelompok. Problem kesadaran berkenaan dengan koneksi antara relasi produksi (atau dengan negara) dan artikulasi kepentingan jangka panjang dan jangka pendek yang tidak terjadi secara otomatis. Problem solidaritas terkait kategori kepentingan kolektif yang memerlukan analisis utama tentang keuntungan

kolektif apa yang diperhitungkan dan bagaimana kepentingan kolektif diakui, ditarsirkan, dan dapat mengkomando loyalitas dan komitmen (Cohen, 1985: 685). Ini berarti bahwa perspektif teori ini telah berkembang dari pendekatan strukturalis menjadi konstruksionis, disebut dengan perspektif konstruksionis sosial (*social constructionist perspective*) atau konstruksionisme sosial (*social constructionism*) (Barkan dan Snowden, 2001: 25).

Ada tiga elemen utama yang ditawarkan sebagai solusi, yakni: (1) merevisi konsep pelaku (*actor*) dari pandangan utilitarianisme menjadi pandangan bahwa aktor melekat secara sosial (*socially embedded actor*); (2) memperluas peranan penting mobilisasi mikro (jaringan informal) dalam interaksi bersemuka di dalam beragam konteks kelompok; dan (3) spesifikasi makna yang membangkitkan elemen-elemen oposisional dalam kultur sosiopolitik pada beragam waktu, sifat dan bentuknya (Morris dan Muller, 1992: 6).

Terkait dengan kategori aktor gerakan sosial, McCarthy dan Zald memperhatikan posisi masing-masing sebagai “*adherents*”, “*constituents*”, “*potential beneficiaries*”, “*bystanders*”, dan “*authorities*”. *Adherents* adalah individu atau organisasi yang percaya terhadap tujuan gerakan; *constituents* adalah mereka yang memberikan dukungan sumberdaya kepada organisasi gerakan sosial; dan *baystanders* adalah mereka yang bersikap netral terhadap gerakan sosial (McCarthy and Zald. 1977: 1220-1221). Sedangkan Hunt, Gamson dan Snow (1994) membagi menjadi tiga kategori, yakni *protagonist*, *antagonist* dan *bystanders*. *Protagonist* mencakup semua kelompok dan kolektivitas yang mendukung gerakan atau yang merasa kepentingannya terwakili. Mereka termasuk *adherent*, konstituensi, dan *beneficiaries*. Inti dari protagonis gerakan adalah *adherent*, yang ikut serta dalam aktivitas gerakan dalam mengejar tujuannya. Sedangkan konstituensi adalah aktor yang menjadi basis protagonis gerakan. Sedangkan *antagonist* adalah mereka yang berdiri sebagai oposisi terhadap konstituen dan *adherent* gerakan (McAdam dan Snow. 1997: xxii-xxiv).

Mobilisasi mikro tidak hanya berkaitan dengan konteks di mana identitas kolektif dan *frame* tindakan dikonstruksi, tetapi juga menyangkut lokus di mana lokalitas diciptakan yang mendukung terbentuknya solidaritas organisasional. Proses mobilisasi mikro secara eksplisit berada di dalam sistem sosial yang memperkuat ketimpangan struktural. Perjuangan pada level mikro terkait dengan pelembagaan kepercayaan dan komitmen loyalitas. Perjuangan berperan dalam meningkatkan kesadaran, dalam proses konfrontasi dan polarisasi melalui mana kepercayaan dan identitas kolektif dimodifikasi dan ditransformasikan dalam gerakan. Taylor dan Whittier mengajukan konsepsi utama bagaimana komunitas oposisional mentransformasi para anggota sebagai pelaku politik. Komunitas oposisional atau komunitas identitas politik didefinisikan sebagai “jaringan individu dan kelompok secara longgar berbasis institusional, keragaman tujuan dan pelaku, dan identitas kolektif yang menawarkan kepentingan bersama beroposisi dengan kelompok dominan” (Morris and Muller, Editors., 1992: 13).

Upaya untuk membedakan tindakan individu dalam bentuk “rasional” dan “emosional” atau “irasional” sebenarnya menolak kompleksitas perilaku manusia itu sendiri. Aspek psikososial (kognisi dan afeksi sosial) dan sosiokultural berada dalam kesatuan kapabilitas struktur schemata pelaku. Pertimbangan biaya dan keuntungan itu penting, tetapi menterjemahkan hubungan sosial obyektif ke dalam kelompok kepentingan yang mengalaminya secara subyektif juga penting. Aspek-aspek seperti pengalaman, nilai-nilai inti dan kepercayaan, filsafat kehidupan, dan ideologi selalu berada dalam proses interpretasi (dan afeksi) yang terkait dengan tindakan, pemahaman terhadap peluang dan tantangan di dalam lingkungan sistem sosiopolitik (Carmin dan Balser, 2002).

Cohen (1985) mengajukan pentingnya memperhatikan konsepsi identitas kolektif, solidaritas, dan kesadaran. Ketiganya menyangkut proses hubungan antara individu dengan sistem sosiokultural yang menurut Gamson dapat dilihat pada level jaringan informal (mobilisasi mikro). Klandermans mengidentifikasi lima konsep utama gerakan

sosial yang memperhatikan aspek-aspek simbolik dari mobilisasi, yakni liberasi kognitif, diskursus publik dan paket ideologi, formasi dan mobilisasi konsensus, pensejajaran frame (*frame alignment*), dan identitas kolektif. Liberasi Kognitif (*cognitive liberation*) menurut McAdam (1982) menunjuk pada transformasi kesadaran antar partisipan potensial dalam tindakan kolektif. Ini merupakan suatu perubahan kesadaran dalam tiga hal, yaitu: (1) sistem yang kehilangan legitimasi, (2) orang-orang yang tadinya fatalistik kemudian mereka mulai menuntut perubahan, dan (3) mereka mengembangkan perasaan baru terhadap kemajuan politik (Morris dan Muller, 1992:54).

Diskursus publik (*public discourse*) oleh Gamson (1989) dikaitkan dengan peranan media massa untuk memahami formasi dan aktivasi mobilisasi potensial. Peranan media massa juga penting dalam mendesiminasikan paket ideologi (*ideological packages*) gerakan. Pada awalnya Klandermans (1984) membedakan antara mobilisasi konsensus dan mobilisasi tindakan. Kemudian Klandermans (1988) membedakan mobilisasi konsensus sebagai upaya sengaja yang dilakukan pelaku sosial untuk menciptakan konsensus antar bagian dari populasi, dan formasi konsensus menunjuk pada bertemuannya makna yang tidak direncanakan dalam jaringan sosial dan subkultur. Pensejajaran frame (*frame alignment*) menurut Snow (1986) menunjuk pada frame kognitif individu partisipan menjadi tersejajarkan dengan frame ideologi suatu organisasi gerakan sosial. Identitas kolektif (*collective identity*) menunjuk pada perasaan kelompok yang mendefinisikan diri sebagai siapa “kita” (*ingroup*) (Morris dan Muller, 1992: 79-80)

Ia juga membedakan antara tiga proses konstruksi makna pada level yang berbeda di dalam konteks gerakan, yakni diskursus publik, komunikasi persuasif, dan meningkatnya kesadaran selama episode tindakan kolektif. Masing-masing memiliki dinamikanya sendiri, saling mempengaruhi, sehingga berada dalam proses konstruksi dan rekonstruksi. Seperti proses membentuk dan mentransformasikan kepercayaan kolektif berada dalam cara berbeda. Pada level pertama melalui penyebaran jaringan konstruksi makna; pada level kedua melalui upaya sengaja melakukan persuasi; dan pada level tiga melalui diskusi antar partisipan (Johnston dan Klandermans, 1995: 10).

Teori mobilisasi sumberdaya yang memperhatikan aspek sosial psikologis berhasil dikembangkan oleh McAdam, McCarthy dan Zald (1996) (McAdam, McCarthy dan Zald, 1996: 2), dan kemudian diperkuat oleh McAdam, Tarrow dan Tilly (2001) (dalam McAdam, Tarrow dan Tilly, 2001: 17). Mereka mencoba melakukan sintesis di antara ketiga konsepsi utama yang saling terkait secara dinamis dan yang menentukan muncul dan berkembangnya gerakan sosial, yakni: (1) struktur peluang politik dan tekanan-tekanan terhadap gerakan sosial; (2) bentuk-bentuk organisasi, baik formal maupun informal, yang dapat digunakan untuk melakukan gerakan; dan (3) proses-proses kolektif dari interpretasi, atribusi dan konstruksi sosial yang menjadi mediasi antara peluang dan tindakan kolektif. Ketiga faktor utama tersebut diringkas dalam tiga konsep, yakni: struktur mobilisasi sumberdaya, struktur peluang politik, dan pemingkakan kolektif (McAdam, McCarthy dan Zald, 1996: 2).

Meskipun pendekatan sintesis tersebut masih tampak cenderung bias struktural, hingga saat ini masih mendominasi studi gerakan sosial karena mampu menjelaskan dan menawarkan prediksi kuat berbasis dukungan fakta empiris (King, 2008:26). Lagi pula, ketiga konsepsi utama tersebut telah terbukti berguna dalam menjelaskan hasil gerakan sosial. Akan tetapi, dengan banyak kritik yang ditujukan padanya karena ruang lingkungannya yang terlalu luas, maka setiap penelitian yang menggunakan pendekatan ini dihadapkan pada pentingnya mengkonsentrasikan sesuai dengan lingkup gerakan sosial yang diteliti.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan terhadap gerakan petani di Provinsi Lampung periode tahun 1998-2015 yang direpresentasikan oleh organisasi gerakan petani pada level provinsi

yang membina organisasi-organisasi petani lokal sebagai basis sumberdaya gerakan. Organisasi gerakan petani yang diteliti adalah: Dewan Tani Lampung, Dewan Rakyat Lampung, Ikatan Petani Lampung, Petani Mandiri, Paguyuban Reformasi Aktif Masyarakat Tani Indonesia, Serikat Petani Lampung Indonesia-Lampung, Mirak Nadai, Aliansi Petani Indonesia, Aliansi gerakan Agraria, Persatuan Petani Mesuji Way Serdang, Aliansi Gerakan Rakyat Indonesia Berkarya, dan Gabungan Petani Lampung.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi, perekaman, observasi non partisipan, dan dokumentasi. Sumber data adalah pemerintah daerah, Kepolisian, aktivis LSM pendukung, pengurus inti organisasi tani, akademisi, aktivis gerakan petani, dan petani basis. Alat pendukung pengumpulan data menggunakan alat perekam, Camera, E-mail, WA, dan handphone.

Pengumpulan dan analisis data dilakukan proses dialogis antara peneliti dengan tineliti. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa dinamika internal gerakan petani sebagai hasil kerja pengalaman praktis dan pembingkaian para aktor, sehingga di dalamnya melibatkan berbagai proses pemaknaan subyektif dan intersubyektif. Atau, gerakan petani merupakan hasil dari proses konstruksi sosial atas realitas. Dinamika internal organisasi gerakan petani tidak “*given*” dan deterministik, tetapi lebih dilihat berada pada kontrol kesadaran aktif aktor, merupakan tampilan hasil proses konstruksi yang terkait dengan persepsi, orientasi, pilihan-pilihan, dalam membaca peluang politik dan dalam mengatasi hambatan-hambatan, termasuk dalam mengembangkan strategi adaptasi gerakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Formasi Sistem Sosial Agraria Antagonis: Akar Konflik Tanah dan Perjuangan Petani

Cukup mudah untuk memahami secara teknis bagaimana eratnya hubungan timbal balik antara manusia dengan tanah. Tetapi masalahnya menjadi lebih kompleks ketika masuk pada pemahaman tentang hubungan antar manusia atau antar institusi terkait dengan kebutuhannya terhadap tanah. Masalah utamanya bukan semata-mata dilihat dari sisi hubungan teknis, tetapi lebih dari itu, secara sosiologis, perlu dilihat dari dimensi sosiopolitik dan sosiokultural yang membentuk hubungan antar aktor yang terlibat dalam penguasaan tanah. Hubungan antara aktor dengan obyek tanah merupakan hubungan teknis agraria, sedangkan hubungan antar aktor dalam penguasaan tanah tersebut sebagai hubungan sosial agraria.

Struktur hubungan antar aktor terkait dengan tanah secara umum dapat dibedakan dalam tiga elemen institusi sosial, yakni negara, swasta dan petani. Negara direpresentasikan oleh lembaga pemerintah (pusat dan daerah), swasta atau swasta direpresentasikan oleh perusahaan milik swasta dan milik pemerintah (BUMD, BUMN), dan petani direpresentasikan oleh organisasi tani. Perbedaan menjadi tiga kategori institusi sosial tersebut memang tampak menyederhanakan realitas. Tetapi, dalam studi ini diperlukan agar mempermudah melakukan analisis hubungan di antara ketiganya dalam penguasaan tanah.

Masing-masing dari ketiga institusi tersebut dapat dilihat sebagai suatu organisasi sistem yang memiliki prinsip-prinsip struktural tersendiri yang berbeda secara khas. Selain itu, hubungan antar ketiga elemen institusional tersebut dalam penguasaan tanah membentuk suatu formasi struktur politik agraria. Totalitas hubungan antar ketiga elemen tersebut di dalamnya melekat unsur-unsur kontradiksi, negasi dan mediasi, sehingga pola hubungannya bisa mengarah pada dua titik ekstrim, yakni simbiosis-mutualistis dan antagonis.

Mengacu pada pandangan Giddens (1984) tentang makna konsep struktur dan sifat-sifat struktural, dapat digunakan untuk menganalisis sifat-sifat struktural masing-masing

institusi negara, swasta dan petani dan formasi struktur politik agraria. Cara kerja negara didasarkan pada dimensi politik menurut konstitusi (UUD 1945), sedangkan cara kerja swasta dan petani didasarkan pada pemikiran Marx (Stephen K. Sanderson. 2000: 221). Cara kerja swasta adalah sesuai dengan cara produksi kapitalis, sedangkan cara kerja petani sesuai dengan cara produksi komoditi sederhana atau tradisional (Tabel 1).

Tabel 1. Prinsip Struktural Antar Elemen Sistem Politik Agraria

Elemen Sistem	Karakter Prinsip Dasar
Negara	Sebagai institusi politik yang “menguasai” tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (politik agraria).
Swasta	Sebagai institusi ekonomi yang mampu mengelola tanah dalam skala besar dan luas berbasis pada prinsip-prinsip manajemen ekonomi moderen (ekonomi agraria).
Petani	Sebagai institusi sosial yang menempatkan tanah melekat dalam kultur kehidupan sehari-hari (sosiokultural agraria).

Pertama, negara sebagai institusi politik memiliki legitimasi atas “penguasaan” tanah. Di Indonesia menurut konstitusi, negara dengan kapasitas politiknya bersumber pada komitmen terhadap makna “menguasai” tanah yang secara ideologis ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip kerjanya adalah negara sebagai suatu institusi yang secara politik memiliki kapasitas produksi struktur signifikansi, struktur dominasi sumberdaya otoritatif (politik) dan alokatif (ekonomi), dan struktur legitimasi (hukum) penguasaan tanah.

Kedua, swasta sebagai institusi ekonomi memiliki kapasitas mengelola dan mengeksploitasi tanah berbasis pada prinsip-prinsip manajemen ekonomi dan teknologi moderen. Prinsip ekonomi bagi swasta adalah dengan biaya seminimal mungkin untuk mendapat keuntungan seoptimal mungkin. Prinsip kerjanya adalah melalui uang/modal/kapital digunakan untuk mengorganisasikan kegiatan bisnis yang akan menghasilkan barang (komoditi) yang dijual ke pasar untuk menghasilkan sejumlah uang (*money – commodity – money*). Tujuan akhirnya adalah terjadinya akumulasi kapital.

Ketiga, petani merupakan institusi sosial memiliki kapasitas mengelola dan memanfaatkan tanah berbasis pada prinsip-prinsip sosiokulturalnya. Prinsip kerjanya adalah melalui tanah yang aktif dikuasai dan dikelolanya maka petani menghasilkan komoditi yang dapat dipertukarkan dengan uang yang sebanding. Kemudian uang itu digunakan untuk membeli beberapa komoditi lain yang sebanding (*commodity – money – commodity*). Tujuan akhirnya adalah terjadinya peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan sistem sosiokultural petani.

Guna memenuhi kepentingan atas tanah maka ketiga elemen institusi sosial tersebut perlu suatu bangunan sistem yang disebut “Sistem Sosial Agraria”. Konsep ini diartikan sebagai pola hubungan sosial yang dikonstruksi oleh negara, swasta dan petani berdasarkan prinsip-prinsip strukturalnya yang diorganisasikan sebagai praktek-praktek sosial agraria (hubungan sosial berbasis penguasaan tanah) dalam kehidupan sehari-hari.

Sistem sosial agraria di Indonesia menurut konstitusi menunjukkan bahwa negara, swasta dan petani diciptakan berada dalam pola hubungan yang tidak seimbang. Negara secara politik diposisikan berada di atas swasta dan petani. Negara mempunyai kekuasaan yang sah atas tanah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan dijamin hak monopolinya untuk menggunakan “kekuatannya”, baik secara fisik maupun administratif dalam konteks mencapai tujuan kemakmuran bersama yang setara, adil dan manusiawi. Sedangkan antara swasta dan petani pada berposisi dalam hubungan sejajar, karena keduanya berada dalam wilayah politik yang sama. Melalui kekuasaan negara, maka kedua elemen swasta dan petani dijamin dapat membangun pola hubungan yang setara, adil dan manusiawi dalam penguasaan tanah.

Logika rasional dan institusional tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa negara menguasai tanah yang secara politik mampu mengembangkan unsur mediasi untuk mencapai kepentingan bersama dan dapat menjembatani antara kepentingan swasta dan petani. Konsekuensinya adalah semakin kuat posisi swasta bersinergi dengan petani, maka semakin kuat posisi negara. Pada akhirnya, ketiganya sama-sama dapat memperoleh manfaat secara adil terhadap tanah. Oleh karena itu, hubungan antara ketiga elemen tersebut cenderung mengarah pada pola dasar sistem sosial agraria simbiosis-mutualistik.

Potensi kontradiksi dan negasi antar ketiga elemen tersebut tetap ada dan tidak dapat diabaikan, karena masing-masing memiliki prinsip dan sifat struktural yang secara mendasar berbeda. Mengacu pada pola dasar sistem sosial agraria tersebut, maka unsur kontradiksi dan negasi dapat diminimalisir sejalan dengan komitmen bersama untuk mengembangkan unsur mediasi. Upaya ini berkonsekuensi bahwa kepentingan masing-masing pihak akan terwujud dalam praktek sosial agraria yang cenderung mengarah pada pola hubungan simbiosis-mutualistik. Artinya, meskipun di antara ketiga elemen sistem tersebut dikonstruksi dalam kerangka struktur hubungan dominasi negara, tetapi baik hubungan vertikal maupun horizontal selalu mengarah pada peluang untuk dapat dikembangkan hubungan simbiosis-mutualistik.

Realitasnya, sistem sosial agraria yang dikonstruksi berada dalam pola hubungan antagonis terhadap petani. Hubungan antara negara dan swasta cenderung simbiosis mutualistik, sedangkan antara keduanya dengan petani cenderung antagonis. Penyelesaian konflik pertanahan melalui jalur formal kurang diminati oleh petani, karena sering mengabaikan asas kesetaraan dan keadilan, hak-hak adat, dan hak-hak historis. Pada situasi yang demikian, maka sistem sosial agraria selalu rentan terhadap krisis karena selalu diwarnai oleh konflik-konflik pertanahan dan perlawanan petani, sampai pada perjuangan melalui gerakan sosiopolitik.

4.2. Perkembangan Struktur Gerakan Petani: Turbulensi dan Diaspora

Gerakan petani di Lampung merupakan rangkaian perjuangan untuk mendapatkan aset tanah mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks sesuai dengan perkembangan struktur peluang politik. Sebelum melakukan gerakan sosiopolitik, perjuangan petani sudah dilakukan dalam tiga tahapan, yakni aksi protes, gerakan quasi konsensus, dan gerakan lokal-tradisional. Pertama, aksi-aksi protes petani masih belum terorganisir atau tidak berbentuk (*amorph*), spontan, emosional, dan sporadis baik sembunyi-sembunyi maupun terbuka dan sering berupa amuk massa disertai kekerasan. Kedua, gerakan quasi konsensus dilakukan dimana beberapa kelompok atau komunitas petani lokal yang berjuang bersama menyelesaikan persoalan tanah melalui jalur hukum, mediasi dan negosiasi. Ketiga, gerakan lokal-tradisional berupa aksi-aksi kolektif petani melalui wadah organisasi dan strategi aksi yang sederhana, terikat pada struktur otoritas tradisi setempat, berskala lokal.

Meskipun semua rangkaian perjuangan tersebut gagal, semangat perjuangan petani tidak melemah bahkan memacu munculnya kesadaran oposisi. Solidaritas, loyalitas dan komitmen diantara mereka semakin menguat dan meluas. Situasi ini berpengaruh terhadap formasi dan aktivasi kultur oposisi, sehingga berkembang "*sub kultur oposisi*" petani. Di dalamnya terdapat penguatan kesadaran konfliktual dan berfungsi sebagai "*tool kit*" dalam mengkonstruksi tindakan strategis gerakan sosiopolitik.

Terbukanya struktur peluang politik pada awal reformasi dan dengan hadirnya elemen pendukung yang semakin kuat maka proses pengorganisasian petani basis (lokal) dapat dilakukan secara sporadis dan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian segera dibentuk organisasi gerakan skala provinsi dan perjuangannya dapat dikembangkan menjadi gerakan sosiopolitik. Orientasi gerakan diarahkan pada isu-isu *postmaterial* (hak asasi manusia, keadilan sosial, demokrasi dan kedaulatan petani). Pada tahap ini mampu

dikembangkan secara optimal struktur sumberdaya mobilisasi, solidaritas sosial, formasi ideologi, nilai perjuangan, jejaring, dan strategi gerakan.

Inovasi-inovasi strategi gerakan sosiopolitik merupakan hasil kerjasama antara petani dan segenap pendukungnya. Meskipun memiliki sifat-sifat sosiokultural yang berbeda, keduanya memiliki posisi yang sama penting dalam membentuk struktur gerakan. Mereka membentuk sinergi formasi gerakan sesuai dengan sifat-sifat sosiokultural masing-masing. Elemen pendukung berperan dalam berhubungan dengan para pemegang otoritas, sedangkan elemen petani memperkuat jaringan di bawah sampai dengan petani basis. Kekuatan formasi gerakan tersebut mampu meningkatkan posisi tawar petani terhadap pihak lawan (pemerintah atau negara dan swasta).

Sejalan dengan menguatnya posisi tawar tersebut terdapat upaya memformalkan organisasi gerakan skala provinsi, tetapi justru terjadi proses pembelahan struktur gerakan. Antara elemen petani pendukungnya semakin berjarak. Situasi ini semakin melemahkan kekuatan gerakan, legitimasi dan kredibilitasnya menurun baik dihadapan petani, pemerintah maupun swasta. Proses ini semakin tampak ketika perwakilan dari organisasi gerakan dikeluarkan dari tim mediasi yang dibentuk pemerintah provinsi dalam penyelesaian konflik-konflik pertanahan, karena dianggap "duri dalam daging".

Isu-isu kritis dan strategis tentang persoalan substansif petani tidak diproduksi lagi, dan bahkan terjadi komodifikasi sumberdaya gerakan. Kondisi ini menambah *distrust* petani basis terhadap peran organisasi gerakan sebagai wadah perjuangan petani karena dianggap sudah tidak mampu mengartikulasikan kepentingan petani. Aksi-aksi kolektif menurun drastis dan sudah tidak lagi menjadi pilihan strategi gerakan yang utama. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh perilaku para elit aktor yang mengalami disorientasi tindakan guna mencapai kepentingan sesaat.

Dalam perkembangannya, eksistensi beberapa organisasi gerakan semakin mengerucut terdiri dari elemen petani dan tidak mau lagi tergantung pada elemen pendukung. Sikap tersebut berkonsekuensi semakin tidak mendapat dukungan pihak luar, posisi organisasi gerakan semakin lekat dengan irama dan kultur kehidupan petani basis, dan semakin kehilangan karakternya sebagai gerakan *countercultural*. Banyak organisasi petani basis yang berada pada situasi "*bagaikan anak ayam kehilangan induknya*". Semakin lemah peran organisasi gerakan pada lokus provinsi, maka kekuatan gerakan kembali berada pada posisinya semula, yakni menyebar, terlokalisir dan terkonsentrasi pada wilayah komunitas lokal.

Gambar 1 menunjukkan bahwa perjuangan petani bermula dari kesendirian dan saat ini kembali dalam kesendirian. Proses tersebut terjadi dalam tiga tahapan derajat integrasi struktur gerakan, yaitu tahapan pra-struktur, penguatan struktur, dan disintegrasi struktur. Pertama, tahapan pra-struktur terjadi pada awal perjuangan dalam bentuknya yang paling sederhana. Perlawanan petani relatif masih murni dilakukan oleh petani korban (belum mendapat dukungan pihak luar), berskala lokal dan kasuistik, tidak terorganisir (*amorph*), spontan, emosional, dan sporadis.



Gambar 1. Dinamika Perjuangan Petani, 1998-2015

Kedua, tahapan penguatan struktur. Awal penguatan struktur gerakan didukung elemen non petani ketika petani secara kolektif mulai berjuang menggunakan strategi institusional untuk mendapatkan advokasi hukum. Ketika strategi institusional ini gagal

maka perjuangan petani kembali menggunakan strategi non institusional yang diperkuat dengan melibatkan lebih banyak aktor dari organisasi masyarakat sipil meskipun masih terbatas pada gerakan lokal-tradisional. Puncak penguatan struktur terjadi pada gerakan sosiopolitik. Dalam gerakan ini dukungan elemen non petani sangat kuat terdiri atas berbagai organisasi masyarakat sipil tingkat daerah dan nasional.

Ketiga, tahapan disintegrasi struktur. Situasi ini terjadi bersamaan dengan formalisasi organisasi gerakan petani skala provinsi, menguatnya struktur politik negara, perebutan sumberdaya mobilisasi antar elit aktor, dan konflik antar kelompok yang berujung pada perpecahan dan berdirinya organisasi gerakan yang baru. Sehingga, secara umum terdapat tiga kondisi utama organisasi gerakan petani, yaitu: mati, mati suri, dan hidup stagnan. Kondisi “mati” berarti sama sekali tidak mampu bertahan, tidak ada aktivitas dan tidak diakui petani basis. Kondisi “mati suri” berarti tidak ada aktivitas sama sekali, tetapi masih ada beberapa elit aktor dan petani basis yang mengakuinya. Kondisi “hidup stagnan” berarti ada aktivitas, masih memiliki dan diakui petani basis, dan mampu bertahan tetapi tidak ada perkembangan yang berarti.

4.3. Perebutan Sumberdaya Mobilisasi dan Menguatnya Struktur Peluang Politik

Strukturasi eksternal dan internal gerakan petani di Lampung tidak terlepas dari konsistensi perkembangan struktur peluang politik, dan pandangan serta keyakinan para elit aktor strategis yang terlibat dalam rekonstruksi makna kekuasaan sesuai dengan kepentingan dalam mengembangkan organisasi gerakan petani. Proses pelemahan gerakan dilakukan, *pertama*, melalui upaya “penyumbatan” dari luar dan “pengeroposan” dari dalam; dan *kedua*, ketika makna kekuasaan yang dikonstruksi para elit aktor strategis gerakan tidak lagi berada dalam kerangka pembelaan dan pemberdayaan petani. Terjadinya konflik internal, disintegrasi struktur dan fragmentasi organisasi gerakan sebagai petanda bahwa gerakan petani mengalami “*turbulensi*” dan “*diaspora*”.

Terjadi situasi *turbulensi* menunjuk pada terjadinya perubahan struktur dan kultur baru yang tidak mengarah pada penguatan formasi gerakan, tetapi justru berkembang konflik internal yang mengarah pada perpecahan dan bercerai-berainya organisasi petani basis (lokal). Sedangkan *diaspora* menunjuk pada terjadi pemisahan atau keterputusan hubungan antara persoalan substantif petani dengan kepentingan para elit aktor gerakan yang diwujudkan dengan dibentuknya beberapa organisasi gerakan petani yang baru. Terjadinya kedua situasi ini mengancam keberlanjutan gerakan, karena orientasi dan tindakan kelompok aktor semakin tidak dapat disatukan lagi dalam suatu struktur dan kultur gerakan yang solid, tidak terintegrasi, dan tidak berjalan sinergis.

Pola relasi kekuasaan dalam gerakan petani pada masa ini berubah cepat dan berbeda secara diametral. Hubungan di antara pihak-pihak yang berperan aktif dalam penguatan struktur gerakan yang tadinya mengarah pada pola “*generative power*” kemudian berubah mengarah pada pola “*distributive power*”. Artinya, pada awalnya antar elemen aktor dalam struktur dan antar kelompok aktor dalam suatu elemen struktur saling memahami bahwa di antara mereka berada pada posisi interdependensi dalam satu kesatuan bangunan gerakan. Kemudian sikap mereka berubah di mana pihak yang satu menganggap pihak lain sebagai menghambat pencapaian kepentingannya. Mendominasi struktur gerakan adalah tujuan utama agar pihak lain dapat mengikuti sesuai kemauannya, atau bahkan disingkirkan.

Kultur relasi kekuasaan dalam pola “*distributive power*” tersebut cenderung berada pada makna kemampuan untuk saling memaksakan kehendak. Karena itu makna kekuasaan dalam dinamika gerakan petani berjalan seiring dengan benturan kepentingan antar pihak-pihak yang tidak dapat dikompromikan, saling memaksakan ideologi atau garis perjuangan, dan terjadi benturan-benturan dalam tindakan praktis. Bahkan di dalam lingkungan elemen pendukung, kepentingan masing-masing kelompok dibalut dengan

ideologi perjuangan yang berbeda secara diametral meskipun orientasi tindakanya sama, yakni cenderung bersifat karikatif (*developmentalism*).

Perbedaan strategi gerakan dalam hubungan kekuasaan yang dipertajam berarti semakin menutup ruang bermediasi, yakni mencari titik temu dalam rangka memperkuat kembali struktur gerakan yang sudah rusak. Kultur hubungan kekuasaan demikian memperkuat kontradiksi dan masing-masing pihak saling menegasikan, sehingga hasilnya cenderung "zero-sum". Jika pihak yang satu menguasai sumberdaya gerakan berarti pihak yang lain kehilangan derajat kekuasaannya. Berkembangnya tindakan-tindakan para elit aktor gerakan yang saling menghalangi berkonsekuensi negatif terhadap perkembangan gerakan petani. Semakin beragamnya organisasi gerakan petani, terutama bukan akibat dari keterbatasan jangkauan kontrol masing-masing organisasi gerakan, tetapi lebih sebagai produk semakin kuatnya struktur politik dan konflik kepentingan di antara para elit aktor strategis gerakan. Konsekuensinya adalah tidak terjadi inovasi isu-isu strategis dan strategi gerakan, serta tidak terumuskannya agenda kerja bersama (*common platform*) untuk mengendalikan keberlanjutan gerakan petani yang *countercultural*.

4.4. Strategi Adaptasi Gerakan Petani

Secara umum dapat disimpulkan bahwa gerakan petani di Lampung pada awal reformasi hanya berpengaruh sementara (sesaat) dalam menggoncang sistem sosial agraria dominan. Katakanlah iklim gerakan tersebut bersifat momental terjadi pada enam tahun pertama era reformasi (1998-2004). Gerakan pada masa ini mampu mempengaruhi para pemegang otoritas untuk memenuhi sebagian klaim-klaim atas tanah yang diperjuangkan petani. Tindakan proaktif para pemegang otoritas tersebut bukan karena kesadaran diskursif tetapi lebih karena keterpaksaan akibat kuatnya tekanan dan lemahnya struktur politik negara. Pada tahun-tahun berikutnya hingga saat ini, menunjukkan bahwa semakin menguatnya struktur politik negara berkorelasi negatif dengan semakin sempitnya peluang gerakan. Kondisi ini berjalan seiring dengan semakin melemahnya kekuatan gerakan petani dalam melancarkan tekanan-tekanan politik melalui aksi-aksi kolektifnya.

Situasi sosiopolitik saat ini oleh sebagian besar elit aktor strategis gerakan petani cenderung dimaknai berada pada ruang yang "given", yang menjanjikan penyelesaian persoalan agraria secara adil dan demokratis, tanpa harus dikontrol melalui aksi-aksi kolektif *countercultural*. Ini merupakan 'kesadaran semu' yang mulai marasuk di dalam *schemata* para elit aktor gerakan. Realitasnya sistem sosial agraria dominan kembali pada jalannya sendiri dan tetap tidak responsif terhadap kepentingan petani. Menurunnya aksi-aksi *countercultural* selain berarti melemahnya kekuatan posisi tawar petani juga terbuka kembali ruang gerak swasta bersinergi dengan negara.

Dengan demikian, gerakan petani di Lampung lebih tampak sebagai luapan sesaat atas ketidakpuasan petani bersama pendukungnya terhadap keberlakuan sistem sosial agraria yang mapan. Perkembangan gerakan petani semakin kehilangan karakternya sebagai kekuatan penyeimbang dalam mengontrol keberlakuan sistem sosial agraria dominan. Artinya, meskipun gerakan sudah dikembangkan dari "by product" menjadi "by design" tetap gagal dalam merubah sifat-sifat sosiokultural sistem sosial agraria dominan yang antagonis menjadi simbiosis mutualistik.

Kekuatan sistem sosial agraria dominan tersebut selain berada pada dimensi otoritas dan legitimasi juga pada dimensi signifikasi. Pada tahun 1990-an isu-isu *landreform* dibangkitkan kembali dalam serial kajian diskursus pembangunan. Pada masa ini isu *landreform* mengalami metamorfosis beririsan dengan paradigma neoliberal, terkait dengan kelompok dominan dalam lingkaran akademisi dan praktisi kebijakan (Berstein, 2008:28). Pada kondisi ini, gerakan petani sangat sulit untuk dapat merubah *schemata* para aktor pembangunan, bahkan rentan terjebak pada lingkungan sosiokultural tersebut. Aktivitas para elit aktor gerakan sudah masuk pada arus utama sistem sosial

agraria dominan meskipun program-program gerakan belum terlembagakan sebagai bagian dari program utama pembangunan.

Arah perkembangan strategi adaptasi gerakan petani pada organisasi gerakan yang sudah lama berdiri dan tidak mengalami ancaman dari pihak luar cenderung masuk pada ruang konservatif dan akomodatif dalam memperjuangkan kepentingan substantif petani. Posisi organisasi gerakan cenderung memelihara hubungan dengan para pemegang otoritas politik (dan ekonomi) untuk menjaga keberlangsungan hidup organisasi dan penguasaan petani atas tanah. Fenomena ini menunjukkan terjadi penguatan tekanan eksternal terhadap kemungkinan penguatan kembali struktur gerakan petani, terutama pada tingkat provinsi. Bahkan ketika fungsi organisasi gerakan diarahkan menjadi suatu komoditas politik dan ekonomi oleh para elit aktor, terutama dalam dinamika politik lokal, maka sebenarnya telah terjadi “proses pembiasaan” kepentingan pragmatis mereka terhadap kepentingan strategis gerakan petani itu sendiri. Disini, perkembangan gerakan petani semakin dihadapkan pada dua pilihan, yakni tetap konsisten pada perjuangan nilai-nilai reforma agraria, atau masuk dalam jejaring kekuatan pihak lawan yang meskipun bersifat instrumental tetapi berguna bagi kelangsungan hidup organisasi dan petani basis.

Organisasi gerakan petani dalam melakukan aksi-aksinya dapat bertahan pada jalur radikalisis (*countercultural*), tetapi juga dapat berubah masuk pada jalur involusi, institusionalisasi dan komersialisasi. *Pertama*, radikalisis merupakan jalur gerakan yang memperkuat struktur mobilitasi sumberdaya. *Kedua*, jalur involusi menekankan secara eksklusif pada insentif sosial. Organisasi gerakan berubah menjadi asosiasi ketika aktivitasnya sebatas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari para anggotanya. Organisasi gerakan tersebut mendukung mobilisasi konstituen tetapi hanya sebatas melayani kebutuhannya atau menggunakan strategi berorientasi klien. *Ketiga*, jalur institusionalisasi menunjuk pada keseluruhan transformasi yang memungkinkan organisasi gerakan menjadi kelompok kepentingan atau partai politik. Eksistensinya masuk dalam sistem intermediasi kepentingan lembaga yang mapan. *Keempat*, jalur komersialisasi menunjuk pada proses transformasi yang mengarah pada organisasi layanan komersial (Tabel 1).

Tabel 1 Strategi Adaptasi Gerakan Petani

Aspek	Orientasi Klien/ Konstituen	Orientasi Otoritas
Partisipasi Konstituen Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Kuat mengarah sebagai organisasi sukarela yang berorientasi konstituen. • Sebagai organisasi gerakan subkultural. <p style="text-align: center;">(Jalur Involusi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lemah sebagai gerakan sosiopolitik. • Lemah sebagai gerakan <i>countercultural</i> sehingga belum mampu sebagai gerakan sosiokultural. <p style="text-align: center;">(Jalur Radikalisis)</p>
Partisipasi Konstituen Tidak Langsung	<p>Belum mengarah menjadi organisasi layanan, sebagai organisasi subkultural</p> <p style="text-align: center;">(Jalur Komersialisasi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai merespon peluang politik institusional dalam dinamika politik nasional dan lokal. • Sebagai kelompok kepentingan atau gerakan instrumental untuk melembagakan program-programnya. <p style="text-align: center;">(Jalur Institusionalisasi)</p>

Sumber: Diadaptasi dari Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N.Zald (Editor's). 1996: 152-157; Hartoyo, 2010, 2015

Meskipun intensitas mobilisasi komitmen dalam gerakan petani sangat penting karena peran organisasi gerakan dapat menghasilkan berbagai alternatif struktural internal yang dapat menjaga stabilitasnya dalam jangka panjang, tetapi sebagian besar

gerakan petani di Lampung berubah menjadi gerakan subkultural, masuk pada jalur involusi, dan institusionalisasi. Perubahan jalur gerakan ini dipengaruhi kekuatan struktur relasi kekuasaan dalam sistem sosial agraria dominan dan berbagai kesalahan konsekuensi dari tindakan para elit aktor strategis untuk mencapai kepentingan pragmatisnya. Isu-isu kritis yang semakin abstrak (menentang neo-kolonialisme, imperialisme dan neo-liberalisme) membuat para elit aktor gerakan semakin samar melihat kedalaman intervensi pihak lawan yang sebenarnya juga ikut ambil bagian dalam menyeret ke arah situasi lain yang dapat melemahkan posisi gerakan petani itu sendiri.

Kecuali yang sudah mati dan mati suri, sebagian besar aktivitas gerakan petani semakin dekat pada alam konservatif, akomodatif, berorientasi kepentingan konstituen, kembali mengandalkan pendekatan institusional, mengalami krisis produksi isu-isu strategis, dan program-program gerakan yang belum terlembagakan meskipun para elit aktor strategisnya sering bernegosiasi dalam merespon dinamika politik nasional dan lokal. Arah perkembangan organisasi gerakan yang hidup stagnan semakin kuat berada pada jalur semi radikal, jalur involusi dan institusionalisasi. Jalur semi radikal ditempuh karena ancaman pihak lawan masih aktif dan berpotensi aktif, sehingga ketika ditekan akan melakukan perlawanan. Jalur involusi ditempuh dengan semakin terfokus pada orientasi material petani basis, menjadi gerakan subkultural, terjebak pada ruang konservatif mendukung keberlakuan sistem agraria dominan yang tetap antagonis terhadap eksistensi petani. Sebagian diarahkan pada jalur institusionalisasi, karena perannya pengarah pada ciri-ciri sebagai kelompok kepentingan.

Penjelasan di atas pada dasarnya menunjukkan terdapat dua strategi adaptasi utama dalam dalam gerakan petani, yaitu strategi *semi countercultural* (semi radikal) dan subkultural (konservatif). *Pertama*, strategi *semi countercultural* dibagi menjadi dua, yaitu Bertahan-melawan dan mempertahankan penguasaan lahan. Strategi bertahan-melawan dipilih untuk mempertahankan tanah yang diduduki, sering mendapat gangguan/tekanan dari pihak lawan, dan sering melakukan perlawanan kolektif. Strategi mempertahankan penguasaan lahan dipilih melalui penguatan hubungan dengan para pemegang otoritas untuk memperoleh jaminan keamanan pada lahan yang sudah dikuasainya dari gangguan pihak luar. Sebagai imbal baliknya organisasi petani basis memberikan dukungan politik dalam dinamika politik lokal. *Kedua*, strategi subkultural ditempuh dengan memperkuat kapasitas internal, melalui penguatan manajemen organisasi, kaderisasi, dan sumberdaya mobilisasi. Selain itu, juga dikembangkan sistem pertanian (organik) dan pemasaran hasil produksi pertanian, memperkuat jejaring dengan organisasi gerakan tingkat nasional, dan berupaya memperoleh kekuatan dan dukungan dalam melaksanakan program-programnya melalui dukungan politik dalam dinamika politik lokal nasional dan lokal.

5. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan yang dapat dirumuskan dari penjelasan di atas, adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor dasar penyebab terjadinya konflik pertanahan antara negara dan swasta dengan petani adalah berlakunya sistem sosial agraria yang berubah dari pola dasarnya. Hubungan antara negara dan swasta adalah simbiosis-mutualistis, sedangkan hubungan antara keduanya dengan petani adalah antagonis.

Kedua, perubahan kekuatan struktur politik berpengaruh terhadap peluang dilakukan tindakan kolektif dalam gerakan petani. Perjuangan petani melalui aksi protes, quasi konsensus, dan gerakan lokal-tradisional yang gagal mendorong berkembangnya "*sub kultur oposisi petani*", dan ini menjadi faktor utama dilakukan gerakan sosiopolitik petani.

Ketiga, berkembangnya gerakan sosiopolitik petani ditentukan oleh derajat ketegangan struktural, terbukanya peluang politik, dan dukungan jejaring eksternal.

Puncak gerakan terjadi selama tahun 1998-2004, kemudian terus menurun hingga saat ini (2015). Penyebabnya adalah terjadi perebutan kepentingan di antara elit aktor strategis, semakin ketatnya struktur peluang politik, dan semakin lemahnya sumberdaya gerakan, manajemen organisasi dan kaderisasi. Selain itu, juga disebabkan oleh semakin lemahnya jejaring eksternal dan produksi isu strategis, serta kondisi gerakan yang stagnan.

Keempat, gerakan *contercultural* berubah menjadi semi *contercultural* dan subkultural, bersifat lokalistik dan cenderung masuk pada jalur involusi. Situasi ini mempengaruhi strategi adaptasi gerakan petani. Strategi gerakan yang ditempuh ini cenderung berubah semakin adaptif terhadap lingkungan sosiopolitik dan sosiokultural dominan, sehingga tujuan gerakan petani menjadi tidak terfokus pada tujuan semula.

DAFTAR RUJUKAN

- Barkan, Steven E., and Lynne L. Snowden, 2001. *Collective Violence*. Allyn and Bacon.
- Berstein, H., Byress, Terence J., Borrass, S., dan Kay, C. 2008. *Kebangkitan Studi Reforma Agraria di Abad 21*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Carmin, Joann and Deborah B. Balsler, 2002. *Selecting Repertoires of Action in Environmental Movement Organizations: An Interpretive Approach*. Sage Publication: <http://www.Sagepublications.com>.
- Cohen, Jean L., 1985. *Strategy or Identity: New Theoretical Paradigms and Contemporary Social Movements*. Dalam "Social Movements", Journal "Social Research: An International Quarterly of The Social Sciences", Vol. 52 No.4 (Winter 1985).
- Giddens, Anthony. 1984. *The Constitution of Society*. Cambridge: Polity Press.
- Hartoyo. 2010. *Involusi Gerakan Agraria dan Nasib Petani: Studi Tentang Dinamika Gerakan Petani di Provinsi Lampung*. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Disertasi.
- Hartoyo. 2015. *Cara Baru Petani Menggugat Kebijakan Agraria: Potret Konflik Pertanahan dan Dinamika Gerakan Petani di Lampung Pasca Orde Baru*. Bandar Lampung, AURA Publishing.
- McAdam, Doug, John D. McCarthy dan Mayer N. Zald (editor's). 1996. *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings*. USA: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug and David A. Snow. 1997. *Social Movements: Reading on The Emergence, Mobilization, and Dynamics*. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.
- McAdam, Doug, Sidney Tarrow and Charles Tilly. 2001. *Dynamics of Contention*. New York: Cambridge University Press.
- McAdam, Doug and David A. Snow. 1997. *Social Movements: Reading on The Emergence, Mobilization, and Dynamics*. Los Angeles, California: Roxbury Publishing Company.
- McAdam, Doug and W. Richard Scott, 2002. *Organization and Movements*. Paper presented at the Annual Meetings of the American Sociological Association, Chicago, IL, August, 2002. Revised draft of a paper prepared for an invitational Conference on Organizations and Social Movements held at the University of Michigan, Ann Arbor, May 10 -11, 2002.
- McCarthy, John D. and Mayer N. Zald. 1977. *Resource Mobilization and social movements: A partial theory*. In *American Journal of Sociology* 82, 1977, 6.
- Morris, Aldon D., and Carol McCurg Muller (Editors). 1992. *Frontier in Social Movement Theory*. New Haven and London: Yale University Press.
- Miller, Valerie dan Jane Covey. 2005. *Pedoman Advokasi: Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mustain. 2007. *Petani vs Negara: Gerakan Petani Melawan Hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

- Ngadisah. 2003. *Konflik Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Wahab, Oki Hajiansyah. 2012. *Terasing di Negeri Sendiri: Kritik Atas Pengabaian Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hutan Register 45, Mesuji, Lampung*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Paradakis, Elim. 1988. *Social Movements, Self-Limiting Radicalism and the Green Party in West Germany*. *Sociology*. Vol.22. No.3: 433-454. From the SAGE Social Science Collections. All Rights Reserved.
- Sanderson, Stephen K. 2000. *Makro Sosiologi: Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Silaen, Victor. 2006. *Perlawanan Komunitas Lokal pada Kasus Indorayon di Toba Samosir: Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: IRE Press.
- Sunarto D.M. 2007. *Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Törnquist, Olle. 2007. *Workers in politics: Why is organised labour missing from the democracy movement ?* [http://www.demos.or.id/demokrasi.aceh/Olle/Labor/Pol/Space 7.pdf](http://www.demos.or.id/demokrasi.aceh/Olle/Labor/Pol/Space%207.pdf). Download 8 Juni 2007.
- Wahyudi. 2005. *Formasi dan Struktur Gerakan Petani: Studi Kasus Reklaiming/Penjarahan Atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.